

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN ANGGARAN 2023



DINAS PERINDUSTRIAN DAN
KETENAGAKERJAAN
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu pelaksana kegiatan dan bekerja secara maksimal guna tercapainya seluruh target yang telah ditetapkan pada Tahun 2023 walaupun masih terdapat kekurangan disebabkan adanya kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan.

Semoga LAKIP Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dapat bermanfaat terutama untuk bahan evaluasi bagi yang berwenang untuk menilai kinerja staf dalam Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, 2024

Kepala Dinas Perindustrian
dan Ketenagakerjaan,

Hj. ANDI ROS IRMA,S.Sos.
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP. 19701001 199203 2 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. GAMBARAN UMUM OPD	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	9
A. RENCANA STRATEGIS.....	9
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	19
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN.....	20
D. RENCANA KERJA TAHUN 2023	24
E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023.....	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	40
A. PENGUKURAN KINERJA.....	40
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	57
C. Realisasi Keuangan	41
BAB IV PENUTUP.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana tugas dan fungsinya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati, Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan fungsi perumusan dan menentukan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian dan Ketenagakerjaan

Pelaksanaan fungsi kelembagaan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan telah menerapkan dan melaksanakan RKPD, RPJMD dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah serta Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten.

Sistem manajemen pemerintahan sudah harus berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam peningkatan akuntabilitas, setiap rencana kinerja didasarkan pada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, program dan kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang berorientasi kesejahteraan masyarakat, dan mampu merespon setiap isu permasalahan strategis yang muncul, serta anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Untuk kinerja kegiatan capaian program harus terjabarkan dalam LAKIP sehingga akan dapat diketahui dari target dan capaian kinerja tahun berjalan. Laporan kinerja berisikan rencana, target, capaian dan realisasi

terhadap pengelolaan keuangan Perangkat Daerah (PD) sehingga dari capaian tersebut dapat terukur dan terevaluasi realisasi pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang laporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap akhir tahun anggaran harus menyampaikan Laporan akuntabilitas Keuangan kepada Pemerintah Daerah (Bupati).

LAKIP Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan tetap mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/2003 baik sistematika penulisan maupun substansinya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tahun 2023 sesuai dengan Permenpan no. 53 tahun 2014 adalah :

1. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 1;
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
3. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, melalui dari saat penyusunan kedalam Dokumen Renstra hingga penjabaran ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja).

Adapun tujuan dari laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan dalam rangka mengimplementasikan kinerja yang telah ditetapkannya dalam bentuk program dan kegiatan

sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian dan kekurangannya untuk dievaluasi. Sehingga menjadi dasar bagi peningkatan kegiatan untuk tahun yang akan datang sekaligus informasi ini dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat yang memerlukan.

C. GAMBARAN UMUM OPD

Dinas Perinnaker sebagai instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki gambaran berikut:

- a) Peringkat : B
- b) Alamat : Jalan Kihajar Dewantara No.2 Benteng
- c) Email : disperinnakerselayar@gmail.com
- d) Telp Kantor : -
- e) Titik koordinat : S 6,118712, E 120,462089
- f) Foto kantor



1. SUMBER DAYA APARATUR

a. Keadaan Pegawai

Keadaan Pegawai Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan jabatan Tahun 2023 sebagai berikut :

- JPTP = 1 orang
- Administrator (Kelas 12) = 1 orang
- Administrator (Kelas 11) = 2 orang
- Pengawas = 4 orang
- Pelaksana = 12 orang
- Fungsional = 6 orang
- Tenaga Kontrak = 29 Orang
- Jumlah = 55 orang

Untuk mengetahui sumber daya Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar, berikut disajikan tabel 1.1 :

Tabel 1.1 Susunan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan komposisi golongan dan eselon

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Strata Dua (S2)	3 orang
2	Strata Satu (S1)	32 orang
3	Diploma 3 (D3)	3 orang
4	Diploma 2 (D2)	2 Orang
5	SLTA	13 orang
6	SD	2 Orang

Sumber data: Data Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tahun 2023

Berdasarkan komposisi aparatur tersebut terlihat bahwa sekolah terendah aparatur Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan adalah SLTA, sehingga dalam proses perjalanannya perlu melakukan beberapa penyesuaian agar tidak mengurangi kinerja. Diimbangi oleh aparatur dengan pendidikan yang lebih tinggi dan mengasah *skill* melalui berbagai pelatihan. Berikut disajikan tabel

Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional pada Tahun 2023

Tabel 1.2 Jumlah Pejabat Struktural pada Tahun 2023

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 Orang
2	Sekretaris	1 Orang
3	Kasubag	4 Orang
4	Kabid	2 Orang
5	Kepala Unit BLK	1 Orang
	Jumlah	9 Orang

Sumber data: Data Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum Dis.Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tahun 2023

Tabel 1.3 Jumlah Pejabat Fungsional pada Tahun 2023

No.	Diklat Penjenjangan	Jumlah
1	Pengantar Kerja	2 Orang
2	Analisis Kebijakan	2 Orang
	Jumlah	4 Orang

Sumber data: Data Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum Dis.Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tahun 2023

b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris terdiri dari;
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perindustrian;
4. Bidang Ketenagakerjaan;
5. Kelompok Jabatan Pelaksana;
6. Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Kepala Dinas Perinnaker mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian dan Ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan pedoman yang berlaku.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang perindustrian, ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perindustrian, ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

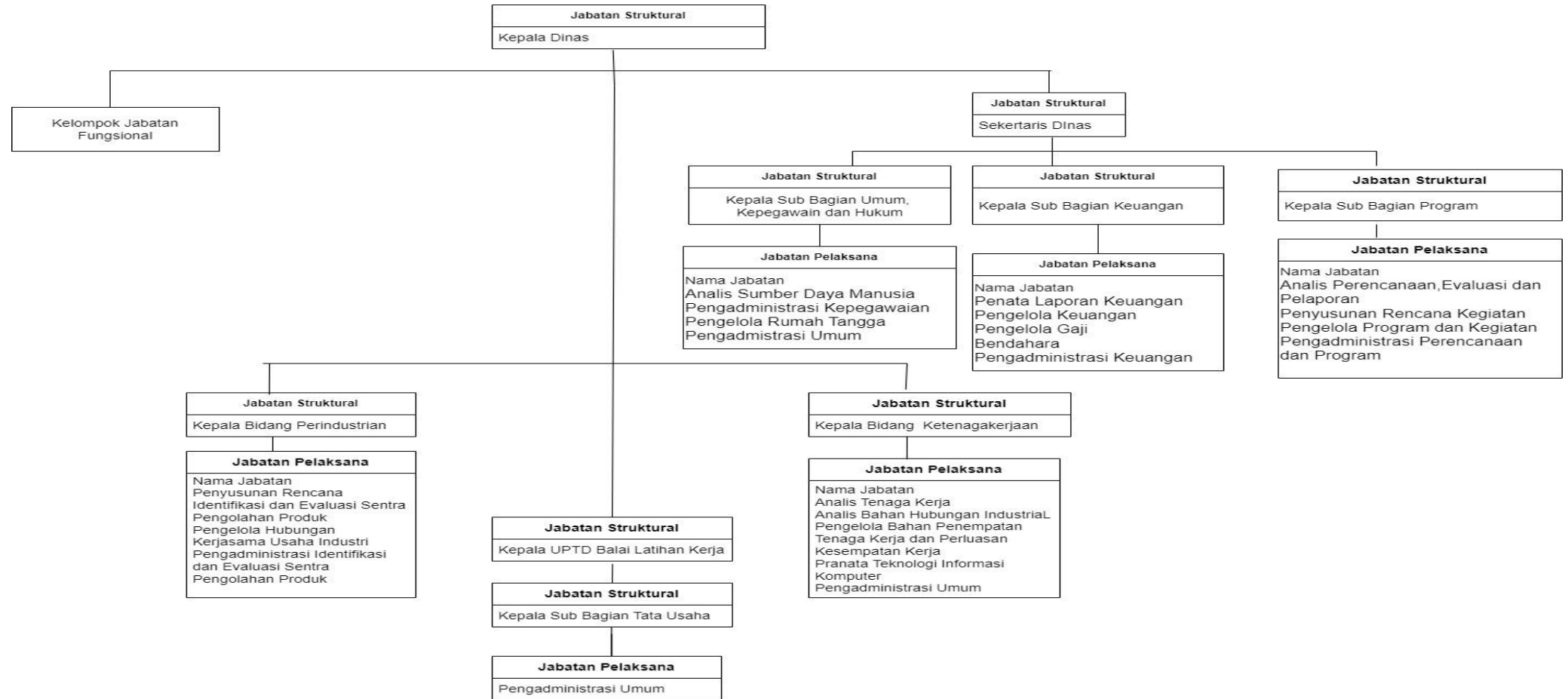
Uraian tugas kepala dinas, meliputi :

- a. menyusun rencana kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyelenggaraan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perindustrian, ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral;
- g. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis tenaga kerja;

- h. menyelenggarakan kebijakan sesuai lingkup tugasnya;
- i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. menyelenggarakan administrasi dinas sesuai lingkup tugasnya;
- k. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang perindustrian, ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral;
- l. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- m. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai perumusan kebijakan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR 50 TAHUN 2022 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN
 KETENAGAKERJAAN

Gambar 1.1
 STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tahun 2021-2026. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang dijabarkan dalam kebijakan dan program.

Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih merupakan landasan perumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan dalam RPJPD. Mengingat visi, misi, dan program kepala daerah merupakan hasil proses politik terpilihnya Kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh masyarakat, maka visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dijadikan sebagai substansi dan rujukan utama penyusunan RPJMD. Namun demikian, demi mendapatkan dokumen perencanaan yang baik, *manageable*, dan selaras dengan manajemen pemerintahan daerah, maka visi dan misi tersebut perlu dikembangkan dan dijabarkan sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, agar tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun dapat dijabarkan secara efektif dalam mencapai tujuan utama pembangunan daerah.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah (saat mencalonkan) adalah bagaimana menyesuaikannya dengan sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode berkenaan. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok yang sama, kepemimpinan yang berbeda dapat menghasilkan visi dan misi yang berbeda pula, tergantung tekanan dan prioritas pembangunan masing-masing. Dengan demikian maka kedudukan RPJMD sangat penting untuk dijadikan landasan penyusunan dokumen RENSTRA SKPD yang dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Mengacu pada uraian di atas serta memperhatikan arah kebijakan tahun ketiga dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 Selayar, RPJPD dan RPJM Propinsi Sulawesi Selatan 2019-2024, substansi RPJM Nasional 2015-2019, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Kepulauan Selayar, serta visi misi Bupati/Wakil Bupati, maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2021-2026 sebagai gambaran realitas masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan adalah :

“Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”

Dalam rumusan visi ini merujuk langsung pokok yakni “Bandar Maritim”. adalah perwujudan visi yang hendak dicapai, “Kawasan Timur Indonesia” adalah wilayah yang menjadi dampak distribusi ke Wilayah Timur Indonesia dalam pencapaian perwujudan visi Sentral logistik.

“**Bandar Maritim**” seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri.

Kawasan Timur Indonesia menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi “Bandar Maritim” merupakan gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran berikut ini:

- i. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Pusat Distribusi Logistik”
- ii. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata”
- iii. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan Terpadu”

Harapan terwujudnya Visi “Bandar Maritim” pada tahun 2026, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah dengan indikator capaian dimulai pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta menjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan

4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dijalankan pada 2021-2026 adalah:

- 1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan**

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas;

- 2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Pedesaan**

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan capaian klasifikasi dan kualifikasi desa menuju, serta segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa;

- 3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat**

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik;

- 4. Meningkatkan Pengelolaan Potensi Kelautan;**

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki;

- 5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan;**

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.

6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan hidup

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah terdegradasi.

Visi Bandar Maritim ditopang oleh program prioritas pembangunan yaitu tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan. Program Prioritas tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Distribusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT); dan
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Program Pembangunan Daerah yang akan digunakan dalam mewujudkan Visi Bandar Maritim tersebut, akan diwujudkan pada tiap kawasan pengembangan, yaitu :

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, didukung oleh 5 (lima) sub kawasan, yaitu : (a). Sub Kawasan Utama pada Kawasan Pelabuhan Benteng; (b). Sub Kawasan 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi; (c). Sub Kawasan 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng–Jampea; (d). Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate; dan (e). Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Pasi–Gusung, didukung oleh 7 (tujuh) sub kawasan, yaitu : (a). Sub Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang; (b). Sub Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya; (c). Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang; (d). Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang; (e). Sub Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi; (f). Sub Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi; dan (g). Sub Kawasan 7 pada Kawasan Pulau Panjang.
3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, didukung oleh 5 (lima) sub sentra, yaitu : (a). Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang; (b). Sub Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi; (c). Sub Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea; (d). Sub Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate; dan (e). Sub Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai penguat atau sebagai penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Gerbangsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, maka dapat diidentifikasi bahwa kontribusi Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan dalam pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

Misi ke 1 : “Mengembangkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan”

Tujuan : Mewujudkan reformasi birokrasi (T-1)

Sasaran : Meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan
(S-1)

Strategi:

1. Menyediakan data dan laporan yang akuntabel dan tepat waktu;
2. Meningkatkan SDM yang profesiona;
3. Menyiapkan sarana dan prasarana yang meningkatkan kinerja

Kebijakan :

1. Menyusun data dan laporan yang akuntabel dan tepat waktu
2. Mengikutkan Pendidikan dan pelatihan aparatur yang membutuhkan peningkatan profesionalisme
3. Melakukan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang kinerja

Misi ke 2 : “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan”

Tujuan : Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Fasilitas
Perekonomian

Sasaran : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Fasilitas
Perekonomian Perdesaan

Strategi : 1. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas dan daya saing tenaga kerja
2. Meningkatkan Upaya penyebarluasan dan informasi kesempatan kerja
3. Meningkatkan perluasan dan kesempatan kerja melalui fasilitasi rekrutmen tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja pada Perusahaan terkait antar daerah, luar negeri maupun sektor kewirausahaan.
4. Meningkatkan harmonisasi hubungan industrial, peningkatan fungsi LKS tripartite, peningkatan sarana hubungan industrial, kesejahteraan tenaga kerja, kelembagaan organisasi serikat pekerja, kelembagaan bipartit dan penetapan upah minimum.

Kebijakan : 1. Perindustrian dapat didorong menjadi motor penggerak perekonomian

1. Mengarahkan perusahaan menyusun dokumen rencana tenaga kerja yang akuntabel
2. Menyediakan tenaga kerja yang berkompetensi produktif dan berkelanjutan sesuai kebutuhan pasar kerja
3. Peningkatan perluasan dan melalui antar daerah dan luar negeri serta mendorong tumbuh kembangnya wirausaha baru
4. Pengembangan standar kompetensi tenaga kerja yang mengacu standar kebutuhan industri/Perusahaan, pengembangan kurikulum, penyediaan instruktur yang kompeten dan penyediaan informasi pasar kerja
5. Peningkatan hubungan industrial agar kondisi hubungan kerja dapat diciptakan keserasian dan keseimbangan hak dan kewajiban serta pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja yang didasarkan pada ketentuan yang berlaku
6. Penyempurnaan penyelesaian ketenagakerjaan, diupayakan melalui upaya pencegahan dan membatasi kasus-kasus ketenagakerjaan dengan pemberian bimtek penyuluhan serta percepatan penanganan kasus dengan didasarkan pada keadilan.

Misi ke 4 : “ Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman”

Tujuan : Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Pelaku Usaha

Sasaran : Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat

Strategi : 1. Mengembangkan Usaha Industri

2. Penyediaan Lahan yang dimiliki oleh pemerintah
3. Meningkatkan Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB

Kebijakan: 1.Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri

2. Penggunaan Sistem Informasi Nasional
3. Sosialisasi PERDA RPIK Tahun 2019

Tabel.2.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, Renstra Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

Visi		: Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia		
Misi 1		: Mengembangkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1	Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah	Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil dan meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SD Maparatur yang ditunjang perangkat teknologi informasi yang mumpuni	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur
			Meningkatkan pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku	Penyusunan Laporan Keuangan dan aset yang Akuntabel
Misi 2		: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Pedesaan		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
2	Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	1. Meningkatkan daya saing dan produktivitas tenaga kerja	1. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas dan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan tenaga kerja 2. Meningkatkan upaya penyebarluasan dan informasi kesempatan kerja melalui penyebarluasan informasi kerja. 3. Meningkatkan Perluasan	

			<p>Dan kesempatan kerja Melalui fasilitasi rekrutmen tenaga Kerja dan penempatan tenaga kerja pada perusahaan terkait antar Daerah, luar Negeri maupun Sektor kewirausahaan</p>	
--	--	--	---	--

Visi		: Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia		
Misi 2		: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Pedesaan		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
2	Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	1. Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	<p>3. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas dan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan tenaga kerja</p> <p>4. Meningkatkan upaya penyebarluasan dan informasi kesempatan kerja melalui penyebarluasan informasi kerja.</p> <p>5. Meningkatkan perluasan dan kesempatan kerja melalui fasilitasi rekrutmen tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja pada perusahaan terkait antar Daerah, luar negeri maupun sektor kewirausahaan</p>	<p>1. Mengarahkan Perusahaan untuk Menyusun rencana tenaga kerja yang berkopetensi produktif dan berkelanjutan sesuai kebutuhan pasar kerja melalui optimalisasi BLK.</p> <p>3. Memaksimalkan program Mobile Training (MTU) BLK untuk meningkatkan kompetensi masyarakat di desa</p> <p>4. Pengembangan standar kompetensi tenaga kerja yang mengacu standar kebutuhan industri/ perusahaan, pengembangan kurikulum, penyediaan instruktur yang kompeten dan penyediaan informasi kerja</p> <p>5. Penyediaan Informasi pasar kerja Online</p> <p>6. Peningkatan perluasan dan melalui Antar daerah dan luar negeri serta mendorong tumbuh kembangnya wirausaha baru.</p> <p>7. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek) Melalui Proram G-SMS</p>

		2. Meningkatnya kualitas hubungan kerja antara tenaga kerja dan perusahaan	Meningkatkan harmonisasi Hubungan Industrial, Peningkatan Fungsi LKS Tripartit, Peningkatan sarana hubungan industrial, Kesejahteraan tenaga kerja, kelembagaan organisasi serikat pekerja, Kelembagaan Bipartit dan penetapan upah minimum.	1. Meningkatkan pembinaan, perusahaan dengan menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 2. Penyempurnaan Penyelesaian Ketenagakerjaan, diupayakan melalui upaya pencegahan dan pembatasan kasus-kasus ketenagakerjaan, dengan pemberian bimtek penyuluh dan serta percepatan penanganan kasus dengan didasarkan pada keadilan.
--	--	--	--	--

Visi		: Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia		
Misi 4		: Mengembangkan pengelolaan potensi kemaritiman.		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
3	Meningkatkan Usaha Pariwisata	Meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha	1. Perwujudan Komsumen berdaya dan pelaku usahayang bertanggungjawab 2. Peningkatan Kualitas kelembagaan produktivitas, daya saing dan kemandirian IKM	1. Mengoptimalkan dukungan terhadap pengembangan produk lokal 2. Meningkatkan produk unggulan daerah 3. Meningkatkan promosi dan pengembangan usaha pelaku IKM

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Mewujudkan pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka Dinas Perinnaker perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur tujuan dan sasaran strategis pemerintahan daerah dan OPD. IKU menggambarkan

target pencapaian indikator OPD sesuai *core business* OPD terkait dan tertuang dalam dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama organisasi.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Disperinnaker Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 -2026 sebagai berikut:

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN

Tugas Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan umum, perindustrian dan ketenagakerjaan, sedangkan fungsinya adalah melaksanakan perumusan dan menentukan kebijakan teknis di bidang perindustrian sebagaimana visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar serta menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Kementrian sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2021-2026

Tabel 2.2

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (T-C.25)**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		B	BB	BB	A
		Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		61,06	66,06	70,06	74,06
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat daerah		70	75	80	85
			Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia		Rasio Kesempatan kerja	0,98%	0,98%	0,99%	0,99%	0,99%
		Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2,75%	3,75%	5,00%	6,50%	8,00%
			Tingkat Produktivitas tenaga kerja	54,00%	56,00%	59,00%	62,00%	65,00%
		Meningkatnya kualitas hubungan kerja antara tenaga kerja dan perusahaan	Persentase penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	42,50%	45,00%	47,50%	50,00%	52,50%
3	Meningkatkan Usaha Pariwisata		Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	4,76	5,59	6,41	7,24	8,07
		Meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha	Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target 2023	Formula
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja	15%	
2	Persentase Izin Pelaku IKM yang telah memiliki PIRT	25%	
3	Persentase IKM yang terdaftar pada sistem informasi nasional	40%	
6	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	73%	$\frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD}}{\text{jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota}} \times 100\% =$
7	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,17%	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100\% =$
8	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	45,66%	$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{jumlah tenaga kerja}} \times 100\% =$
9	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	25%	$\frac{\text{Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar}} \times 100\% =$
10	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	0,90%	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100\% =$

Tabel 2.4.

Indikator Kinerja yang mengacu pada TPB/SDGs (T-C.28)

DINAS PMPTSPTK 2021-2026

No.	Indikator	Persentase Capaian (%)				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Pilar Pembangunan Sosial					
	Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan					
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.					
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	43,31%	44,57 %	47,21%	48,58 %	50%
	Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi					
8.3.	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.					
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	52,68%	53,49%	54,32%	55,15	56,00%
	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.					
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	20%	22%	24%	26%	26%
	Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan					
	Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan					
10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.					
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	43,31%	44,57 %	47,21%	48,58 %	50%

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formula
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	- Nilai Perencanaan Kinerja - Nilai Pengukuran Kinerja - Nilai Pelaporan Kinerja - Nilai Evaluasi Internal
		Indeks Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$
		Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Kesesuaian Laporan Keuangan Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010
2	Meningkatnya Daya Saing dan Prdoduktivitas Tenaga Kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja}}{\text{Jumlah Perusahaan}}$
		Tingkat Produktivitas tenaga kerja	$\frac{\text{Total output}}{\text{Total pekerja}}$
3	Meningkatnya Kualitas Hubungan kerja antara tenaga kerja dan Perusahaan	Persentase penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	$\frac{\text{Jumlah Kasus terselesaikan tahun } n}{\text{Jumlah Kasus Terdaftar tahun } n} \times 100\% =$
		Persentase kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah Tenaga kerja peserta BPJS Naker}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100\% =$
4	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Pelaku Usaha	Persentase Pertumbuhan industri kecil dan menengah tahun 2023	$\frac{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2023} - \text{jumlah industri kecil dan menengah tahun 2022}}{\text{jumlah industri kecil dan menengah tahun 2022}} \times 100\%$

D. RENCANA KERJA TAHUN 2023

Berdasarkan Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2023 telah ditetapkan 9 sasaran dengan dukungan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan sebagai salah satu Stratejik pencapaian sasaran. Rincian sasaran berikut indikator kinerja, satuan dan targetnya dapat dilihat pada tabel Rencana Kinerja 2023.

Guna mengarahkan pencapaian secara efektif, maka disusunlah program dan kegiatan yang implementasinya diatur melalui kebijakan/*policy* yang ditetapkan oleh pimpinan. Strategi pencapaian sasaran tersebut dijelaskan untuk masing-masing sasaran.

Sasaran ini dilaksanakan melalui kebijakan mendorong pemerintahan yang dapat mengefektifkan pelaksanaan otonomi daerah dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

RENCANA KERJA TAHUNAN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Anggaran	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja (%)	70,28%	Rp.3.077.537.000,-	
				Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)	85,00%		
	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp. 17.040.000,-	
				1) Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	Rp. 3.000.000,-
				2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	Rp. 4.000.000,-
				3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	0
				4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	Rp. 4.000.000
5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	Rp. 2.900.000,-				

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Anggaran
			6) Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	Rp. 2.000.000
			7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dok	Rp. 1.140.000,-
			b.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	Rp. 2.218,685.000,-
			1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	30 Orang/bulan	Rp. 2.196.450.000,-
			2) Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Dok	Rp. 7.000.000,-
			3) Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/ semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ semesteran yang tersedia	18 lap	Rp. 15.235.000,-,-
			c.Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp.499.217.600,-
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	31	Rp.171.878.000,-
			Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12Paket	Rp.17.143.600,-
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Lap	Rp.310.196.000,-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Anggaran
			d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Rp.274.444.400,-
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	Rp.65.218.000,-
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	Rp.209.226.400
			e. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	0
			1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0
			2) Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0
			f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Rp.68.150.000,-
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Rp.56.830.0000
			2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	Rp.11.320.000,-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Anggaran
			3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	0	0
2	Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil dan Menengah		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja	15%	Rp. 785.495.000,-
			Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Industri Kab/Kota	100%	Rp. 785.495.000,-
			Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	0	0
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	2 Dok	Rp.100.000.000,-
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dok	Rp.685.495.000,-
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta	0	0		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Anggaran
				Masyarakat (Dokumen)		
			Evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	0	0
	Meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Pelaku IKM yang telah memiliki PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)	25%	0
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	0
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan	0	0

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Anggaran
				selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		
			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	0	0
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terdaftar pada Sistem Informasi nasional	40%	Rp.46.442.000,-
			Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI	Persentase Terlaksananya Penyediaan Informasi	100%	Rp.46.442.000,-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Anggaran
			dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		
			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	1 Dokumen	Rp.46.442.000,-
			Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)		
			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Anggaran
				Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data keSIINas (Dokumen)		
4	Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi (%)	1,17%	Rp.140.800.000,-
		Tingkat Produktivitas tenaga kerja		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	60%	
			Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	100%	Rp.80.800.000,-
			Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada tahun n	32 Orang	Rp.80.800.000,-
			Koordinasi Lintas lembaga dan Kerja sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kesepakatan/ koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana	0	0
			Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada perusahaan kecil	100%	Rp.60.000.000,-
			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan	Rp.60.000.000,-
			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengukuran produktivitas tingkat daerah kab/kota	100%	0
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga	0	0		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Anggaran
				Kerja diTingkat Daerah (Dokumen)		
			Program Penempatan Tenaga Kerja,	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	25%	Rp.42.516.000,-
			Kegiatan Pelayanan Antarakerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pelayanan antar kerja di daerah kab/kota	100%	Rp.6.991.000,-
			Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek danlain-lain untuk Peningkatan Kompetensi (Orang)	0	0
			Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	150 orang	Rp.6.991.000,-
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi pencari kerja	Jumlah Pencari Kerja yang MendapatkanPenyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)kerja	0	0
			Penyelenggaraan unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yangMendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)	0	0
			Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah BU/Perusahaan/Instansi yang menciptakan kesempatan kerja baru	0	0

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Anggaran
			Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kabupaten/kota	Persentase terlaksananya Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kabupaten/kota	100%	35.525.000,-
			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	100 orang	35.525.000,-
			Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	0	0
5	Meningkatnya kualitas hubungan kerja antara tenaga kerja dan perusahaan	Persentase penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang Menerapkan tata kelola perusahaan yang layak	0,90%	Rp.1.082.220.000,-
		Persentase kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	Kegiatan Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang memepunyai wilayah kerja lebih dari 1(satu) Kab/Kota	Persentase terlaksananya Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang memepunyai wilayahbkerja lebih dari 1(satu) Kab/Kota	100%	Rp. 1.055.420.000,-
			Pengesahan Peraturan Bagi Perusahaan Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan	0	0

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Anggaran
				Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar diWLKP Online (Perusahaan)		
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	6666 orang	Rp.1.055,420.000,-
			Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah provinsi	Persentase terlaksana Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah provinsi	100%	Rp. 26.800.000,-
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bimbingan teknis/sosialisasi/FGD tatacara pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang terlaksana	0 perkara	Rp. 26.800.000,-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Anggaran
				Jumlah Perselisihan yang Dicegah		
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	0	0

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah :

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Berikut ini diuraikan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan selama tahun 2023.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formula
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	- Nilai Perencanaan Kinerja - Nilai Pengukuran Kinerja - Nilai Pelaporan Kinerja - Nilai Evaluasi Internal
		Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/Total Unsur yang terisi X Nilai Penimbang
		Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Kesesuaian Laporan Keuangan Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010
2	Meningkatnya Daya Saing dan Prdoduktivitas Tenaga Kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja/Jumlah Perusahaan
		Tingkat Produktivitas tenaga kerja	Total output / Total pekerja
3	Meningkatnya Kualitas Hubungan kerja antara tenaga kerja dan Perusahaan	Persentase penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Kasus terselesaikan tahun n / Jumlah Kasus Terdaftar tahun n X 100% =
		Persentase kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga kerja peserta BPJS Naker/ Jumlah Tenaga Kerja X 100% =
4	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Pelaku Usaha	Persentase Pertumbuhan	Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2023- jumlah industri kecil dan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formula
(1)	(2)	(3)	(4)
		industri kecil dan menengah tahun 2023	menengah tahun 2022/ jumlah industri kecil dan menengah tahun 2023 X100%

**PROGRAM KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.3.077.537.000,-
2.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 785.495.000,-
3	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 0,-
4.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp.46.442.000,-
5.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 140.800.000,-
6.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 42.516.000,-
7.	Program Hubungan Industrial	Rp.1.082.220.000,-
	TOTAL	Rp.5.1.75.010.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja pada tahun 2022.

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk indikator “persentase pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin” menggunakan cara perhitungan yang berbeda karena semakin kecil capaian, semakin baik kinerja yang dicapai.

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Predikat nilai capaian indikator skala pengukuran dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 91	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran capaian perjanjian kinerja tahun 2023 menggambarkan target yang harus dipenuhi Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formula
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	- Nilai Perencanaan Kinerja - Nilai Pengukuran Kinerja - Nilai Pelaporan Kinerja - Nilai Evaluasi Internal
		Indeks Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$
		Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Kesesuaian Laporan Keuangan Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010
2	Meningkatnya Daya Saing dan Prduktivitas Tenaga Kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja}}{\text{Jumlah Perusahaan}}$
		Tingkat Produktivitas tenaga kerja	$\frac{\text{Persentase PDRB}}{\text{Jumlah Tenaga Kerj}} \times 100\%$
3	Meningkatnya Kualitas Hubungan kerja antara tenaga kerja dan Perusahaan	Persentase penyelesaian perselisihan Hubungan Indutrial	$\frac{\text{Jumlah Kasus terselesaikan tahun } n}{\text{Jumlah Kasus Terdaftar tahun } n} \times 100\%$
		Persentase kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah Tenaga kerja peserta BPJS Naker}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100\% =$
4	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Pelaku Usaha	Persentase Pertumbuhan industri kecil dan menengah tahun 2023	$\frac{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2023} - \text{jumlah industri kecil dan menengah tahun 2022}}{\text{jumlah industri kecil dan menengah tahun 2022}} \times 100\%$

Sumber Data: Dinas Perinnaker , 31 Desember 2023

C.Realisasi Keuangan

Realisasi sasaran yang ditetapkan dapat diartikan sebagai perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahunan 2023.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Target yang akan dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 meliputi 6 Program, 13 Kegiatan, dan 25 sub Kegiatan.

1. Target kinerja sasaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Target kinerja sasaran program, kegiatan, dan subkegiatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	REALISASI	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	Permasalahan	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
1	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja (%)	70,28%	100%				
				Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)	85,00%	97%%				
					Rp.3.077.537.000	Rp.2.999.870.154,-	97%			
		Laporan Kinerja Sesuai metode SILAJARA	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%				
					17.040.000,-	17.040.000,-	100 %			
				1) Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan, jumlah Dokumen Renstra PD yang di susun dan ditetapkan	2 Dok	2 Dok			
						3.000.000,-	-			100 %
					2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA pokok yang tersusun	1 Dok			1 Dok
	4.000.000,-					,-	100 %			
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD		1 Dok	1 Dok							
		4.000.000,-	4.000.000,-	100 %						
4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA perubahan SKPD		1 Dok	1 Dok							
		2.900.000,-	2.900.000,-	100 %						

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	REALISASI	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	Permasalahan	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			5) Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		1 Dok 2.000.000,-	1 Dok 2.000.000,-	100 %		
			6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Dok 1.140.000,-	3 Dok 1.140.000,-	100%		
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100% 2.218,685.000,-	100% 2.156.599.808,-	97,20%		
			1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		30 orang/bulan 2.196.450.000,-	24 orang/bulan 2.134.364.808,-	97,17%		
			2) Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 laporan 7.000.000,-	1 laporan 7.000.000,-	100 %		
			3) Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/ semesteran SKPD		18 laporan 15.235.000,-	18 laporan 15.235.000,-	100 %		
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100% 499.217.600,-	100% 498.868.600,-	99,9%		
			1) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12Paket 17.143.600,-	12 Paket 17.058.600,-	99.50%		
			2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		31 Paket 171.878.000,-	31 Paket 171.614.000,-	100 %		
			3) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		1 Laporan 310.196.000,-	2 Laporan 310.196.000,-	100 %		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	REALISASI	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	Permasalahan	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%			
			1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik		274.444.400,-	259.211.746,-			
					12 Laporan	12 Laporan			
			2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		65.218.000,-	53.353.346,-	81,81%		
					1 Laporan	1 Laporan			
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		209.226.400	205.858.400	98,39%		
					100%	100%			
			1) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		68.150.000,-	68.150.000,-	100%		
					16 Unit	16 Unit			
			2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		11.320.000,-	11.320.000,-	100 %		
					6 unit	6 Unit			
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		56.830.0000	56.830.000	100%		
					15%	-			
			Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		831.937.000,-	698.337.000	83,94%		
					100%	100%			
			1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan kebijakan, percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan Industri		785.495.000,-	698.337.000	96,18 %		
					2 Dokumen	2 Dokumen			
			2) Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan		100.000.000,-	96.400.000,-	96,40%		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	REALISASI	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	Permasalahan	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Sarana dan Prasarana Industri						
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		2 Dokumen 685.495.000,-	2 Dokumen 555.495.000	81.04%		
			Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		40% Rp.46.442.000,-	4,76% Rp.46.442.000,-			
					100% 46.442.000,-	100% 46.442.000,-	100%		
			1) Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)		1,17% 140.800.000,-	2,63% 140.578.500			
			Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja		100% 80.800.000,-	100% 80.578.500,-	99,73%		
			Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		32 orang 80.800.000,-	52 orang 80.578.500	99,73%		
			1) Proses Pelaksanaan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		100% 60.000.000,-	100% 60.000.000,-	100%		
			Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil						

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	REALISASI	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	Permasalahan	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			1) Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		10 Perusahaan	10 Perusahaan	100%		
					60.000.000,-	60.000.000,-			
			Program Penempatan Tenaga Kerja		25%	27,55%			
					42.516.000,-	42.438.600,-	99,82%		
			Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%			
					6.991.000,-	6.919.600,-	98,98%		
			1) Pelayanan antar Kerja		150 orang	225 orang			
					6.991.000,-	6.919.600,-	98,98%		
			Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabuapten/Kota		100%	100%			
					35.525.000,-	35.519.000,-	99,98%		
			1) Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)		100 orang	100 orang			
					35.525.000,-	35.519.000,-	99,98%		
			Program Hubungan Industrial		0,9%	0,9%			
					Rp.1.082.220.000,-	Rp.1.082.069.200,-	99,99%		
			Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi Dalam satu Daerah Kab/Kota.		100%	100%			
					1.055.420.000,-	1.055.319.200,-	99,99%		
			1) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		6666 orang	6666 orang			
					1.055,420.000,-	1.055.319.200,-	99,99%		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	REALISASI	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	Permasalahan	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.		100%	100%			
					26.800.000,-	26.800.000,-	%		
			1) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada Kepentingan di satu Daerah Kabupaten/Kota.		0 perkara	0 perkara			
					26.800.000,-	26.750.000,-	99,81%		

Untuk melaksanakan Kegiatan-kegiatan tersebut di atas telah ditetapkan anggaran tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Belanja Tidak Langsung ditetapkan sebesar Rp. 92.85.000,- (sebelum Perubahan) dan setelah Anggaran Perubahan sebesar Rp. 301.878.000,-
- b. Belanja Langsung ditetapkan sebesar Rp. 4.673.084.400,- dan setelah Anggaran Perubahan sebesar Rp. 4.873.132.000,-

Tabel 3.9
Anggaran 2023

No	URAIAN	ANGGARAN 2023		REALISASI	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6
1	BELANJA	Rp.4.771,936.400,-	5.175.010.000,-	Rp.4.963.293.454,-	95,91
	A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. .	Rp. -	Rp. -	
	BELANJA MODAL TANAH	Rp.,-	Rp.130.000.000,-	Rp.-	100%
	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	Rp.98.852.000,-	Rp. 171.878.000,-	Rp.171.614.000,-	
	B. BELANJA LANGSUNG	Rp. ,-	Rp. ,-	Rp	
	BELANJA PEGAWAI	Rp 2.362.936.400	Rp.2.228.250.000	Rp. 2.134.364.808,-	97,17%
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp.2.285.148.000,-	Rp.2.644.882.000,-	Rp. 751.614.000,-	28,41%
	BELANJA HIBAH GU	Rp.25.000.000,-	Rp.,-	Rp.- Rp.2.081.730.698,-	
	SURPLUS/ (DEVISIT)	Rp. 4.771.936.400 ,-	Rp.5.175.010.000,-	Rp.4.967.709.506,- ,-	95,99%

3. Kinerja pelayanan ketenagakerjaan

Pada Tahun 2023 telah terbit Kebijakan yang diambil meliputi kebijakan peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah yang menyelesaikan masalah

masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. laporan tentang kebijakan sebagai berikut:

- a. Daftar Nama Penerima Bantuan Dalam Bentuk Iuran Kepesertaan BPJS Nomor 191/III/Tahun 2023 tentang Penerimaan Pembiayaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Informal;
- b. Daftar Nama Penerima Bantuan Peralatan Nomor 627.a/XI/Tahun 2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pengadaan Mesin Jahit Pada Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023;
- c. Daftar Susunan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 348/VI/Tahun2023 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023;

BAB IV

B . ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 4 (Empat) Sasaran Strategis dengan menggunakan 8 (Delapan) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

1. Sasaran strategis I Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah

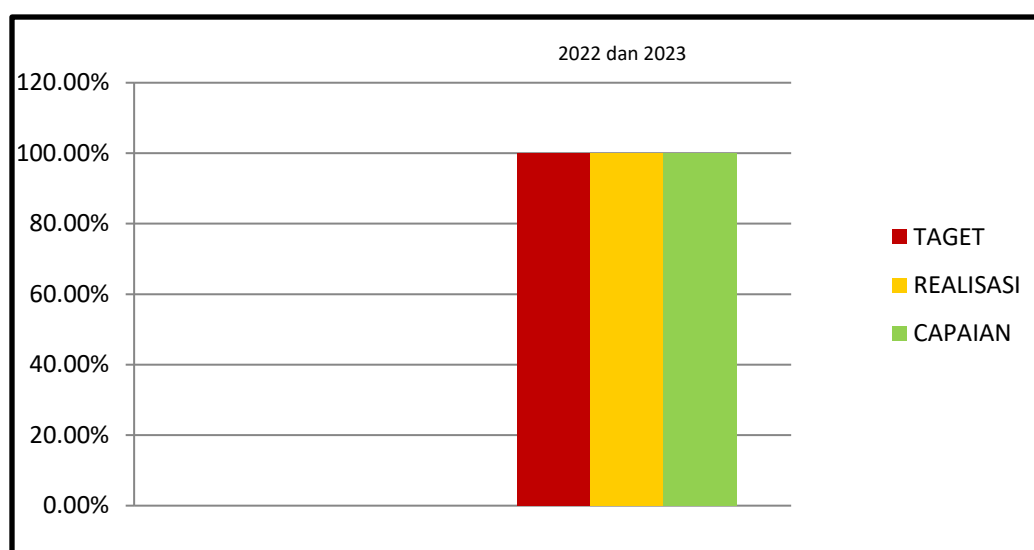
Tabel 3.3
Indikator Kinerja Sasaran ke-1

Sasaran 1	Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah		
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai SAKIP OPD	74,06%		
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 %		
Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Sumber Data: Dinas Perinnaker , 31 Desember 2023

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap penerima layanan pada tahun 2023 memiliki target kinerja sebesar 85% sedangkan untuk penilaian SAKIP targetnya sebesar 74,06 % namun untuk capaian kinerjanya belum dapat dihitung karena belum ada finalisasi penilaian SAKIP oleh inspektorat dan juga belum ada finalisasi penilaian IKM oleh Bappeda Tahun 2023

Gambar 3.1
Diagram Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)



Sumber Data: Dinas Perinnaker , 31 Desember 2023

Upaya peningkatan kesesuaian laporan keuangan Perangkat Daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada tahun 2023 memiliki Nilai Realisasi 100% dari 100% target kinerja sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%. Capai kinerja tahun 2023 bertahan dari tahun sebelumnya, indikator laporan keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan SAP dengan realisasinya sebesar 100%. Berdasarkan capaian tersebut, indikator laporan keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan SAP bertahan pada realisasi 100% berada pada kategori sangat tinggi.

Faktor yang menyebabkan nilai pada realisasi 100% adalah penggunaan Aplikasi keuangan Sistem Informasi Perangkat daerah (SIPD), SIPD Penatausahaan, dan Sumber Daya Manusia yang terus menyesuaikan dengan tujuan pembangunan daerah.

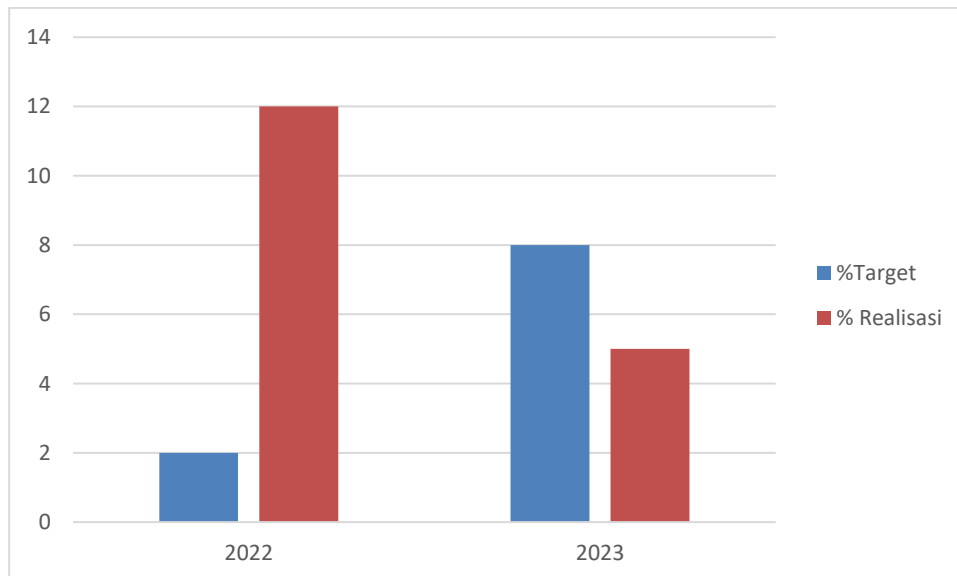
2. Sasaran strategis II Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Tenaga Kerja

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-2

Sasaran 2	Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Tenaga Kerja					
	Tahun 2022			Tahun 2023		
Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Rasio daya serap tenaga kerja (%)	2,75%	12,43%	452,00%	8%	5%	62,5%
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	44,29%	6,27%	14,15%	65%		

Sumber Data: Dinas Perinnaker, 31 Desember 2023

Gambar 3.2
Diagram Rasio daya serap tenaga kerja



Sumber Data: Dinas Perinnaker, 31 Desember 2023

Berdasarkan target yang ditetapkan dalam RPJMD bahwa target dari Rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2023 sebesar 8%. Pada tahun 2023 realisasi Rasio daya serap tenaga kerja sebesar 5% sehingga capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 62,5% berada pada kategori sedang. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2022 realisasi rasio daya serap tenaga kerja mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan karena daya serap tenaga kerja dipengaruhi oleh banyaknya Perusahaan yang membuka lowongan kerja, sedangkan pada Tahun 2023 banyak usaha yang minim tenaga kerja.

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Tahun 2023 belum dapat dihitung karena untuk mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja diperoleh dari PDRB Tahun 2023 dibagi jumlah tenaga kerja Tahun 2023 dan juga tingkat produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh daya serap tenaga kerja, oleh karena itu data PDRB Tahun 2023 belum dirilis oleh BPS sehingga untuk capaian kinerja belum dapat diukur .

3. Sasaran ke III Meningkatnya kualitas hubungan kerja antara tenaga kerja dan perusahaan

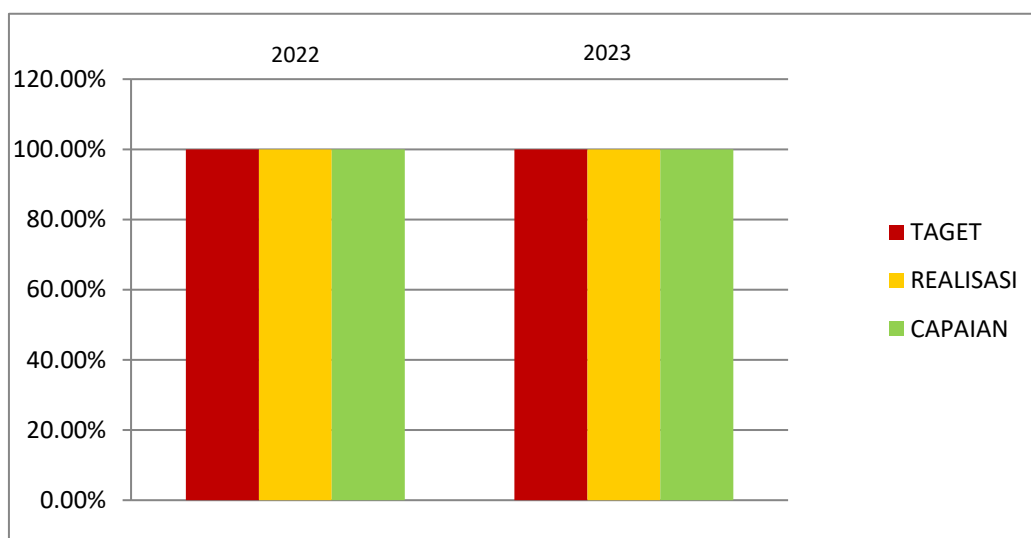
Tabel 3.5

Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-3

Sasaran 3	Meningkatnya kualitas hubungan kerja antara tenaga kerja dan perusahaan					
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	42,50%	61,06 %	143,67%	45%	100%	222,22%

Sumber Data: Dinas Perinnaker, 31 Desember 2023

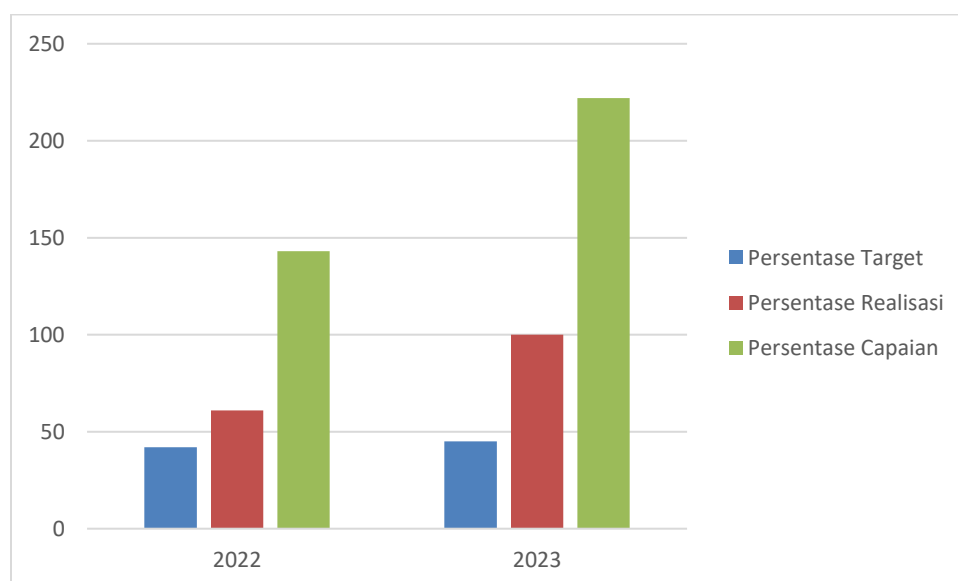
Gambar 3.3
Diagram Persentase penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial



Sumber Data: Dinas Perinnaker, 31 Desember 2023

Upaya meningkatkan Persentase penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial pada tahun 2023 memiliki Nilai Realisasi 100% dari 100% target kinerja sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%. Capaian kinerja tahun 2022 juga memperoleh capaian kinerja sebesar 100%. Berdasarkan perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2023 bertahan di angka 100% sehingga berada pada kategori sangat baik.

Gambar 3.4
Diagram Persentase kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan



Sumber Data: Dinas Perinnaker, 31 Desember 2023

Indikator Kinerja Persentasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 dengan target 45% memiliki nilai realisasi 100 % dengan capaian kinerja 222,22%. Bila dibandingkan pada tahun 2022 persentase capaian kinerja sebesar 143,67%. Indikator Persentase penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sehingga mencapai kategori sangat baik.

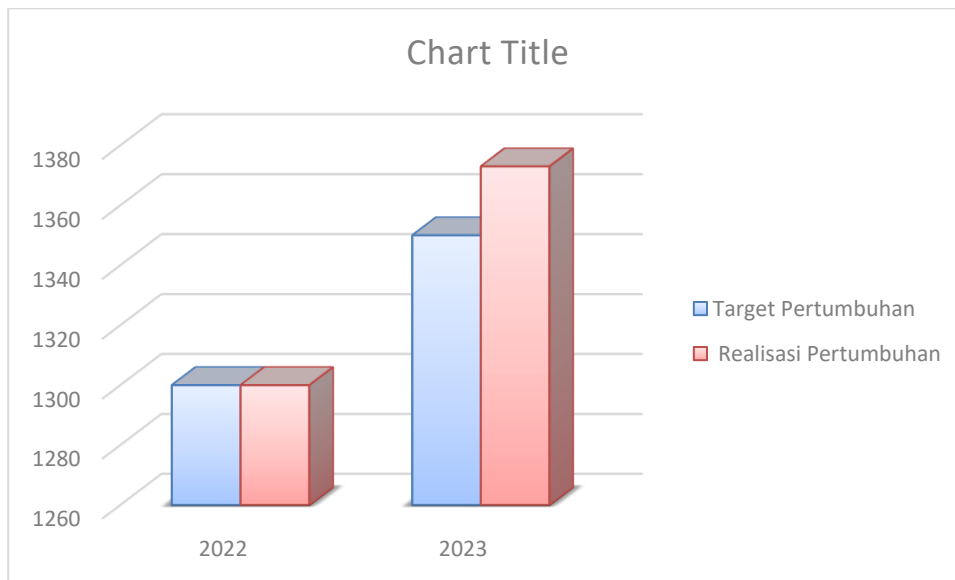
4. Sasaran ke IV Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Pelaku Usaha

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-4

Sasaran 4	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Pelaku Usaha					
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pertumbuhan industri kecil dan menengah	1300	1300	100%	1350	1373	101,70 %

Sumber Data: Dinas Perinnaker, 31 Desember 2022

Gambar 3.5
Diagram Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah



Sumber Data: Dinas Perinnaker, 31 Desember 2023

Berdasarkan persentase pertumbuhan industri Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya karena jumlah IKM bertambah .

PENUTUP

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sangat diperlukan dalam hal mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap publik dan kepada pimpinan.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan

Kabupaten Kepulauan Selayar sudah berupaya dengan optimal dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi sehingga belum presentase tingkat pencapaian target sasaran dengan nilai target masih jauh dari harapan. Berikut Kendala yang dihadapi :

1. Kendala

Perindustrian

- a. Sosialisasi terkait aplikasi pendaftaran PIRT yang belum pernah dilakukan karena tidak anggaran
- b. Pemantauan terhadap Izin Pelaku IKM tidak terpantau melalui pengawasan karena pendaftarannya melalui OSS
- c. Kurangnya tenaga yang menangani aplikasi OSS
- d. Untuk IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja tidak dilakukan pendataan akibat keterbatasan anggaran
- e. Seharusnya dilakukan sosialisasi tentang SIINAS namun anggaran kurang dan diberikan setelah perubahan sehingga waktu tidak mencukupi akibatnya Pelaku IKM tidak memahami cara pendaftaran usaha dalam aplikasi SIINAS sehingga dilakukan kunjungan berulang-ulang ke pelaku IKM

Ketenagakerjaan

- a. Telah disusun Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro namun sampai sekarang belum ada perusahaan yang menyusun RTK.
- b. Sosialisasi dan pelatihan untuk penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro bagi Perusahaan diperlukan namun ketersediaan anggaran kurang.
- c. Tingkat produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh rendahnya daya serap tenaga kerja. Sedangkan pada Tahun 2023 banyak usaha yang minim tenaga kerja

2. Solusi

Guna mencapai target kinerja sasaran organisasi dan menghadapi berbagai kendala yang dihadapi, berbagai upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain :

- a. Melakukan Penataan SDM sesuai dengan potensi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur;
- b. Melakukan pembenahan pada setiap kegiatan berbasis aplikasi sehingga pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan lebih efisien;
- c. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal dan vertikal dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi;
- d. Peningkatan fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi melalui pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 masih jauh dari harapan. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun guna perbaikan penyusunan di masa mendatang kami sangat kami harapkan.

Semoga Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, dan semoga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026 adalah **“Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”** dapat tercapai.

Benteng,

2024

Kepala Dinas Perindustrian
dan Ketenagakerjaan,

Hj. ANDI ROS IRMA,S.Sos.
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP. 19701001 199203 2 013